



# Manajerial: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi

Journal homepage: <http://ejournal.upi.edu/index.php/manajerial>



## Studi Literatur Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah

*Ade Sobandi, Abi Sopyan Febrianto, Dea Susita Herdiant*

Universitas Pendidikan Indonesia

\*Correspondence: E-mail: [ade@upi.edu](mailto:ade@upi.edu), [abisopyan@upi.edu](mailto:abisopyan@upi.edu), [deasusita26@upi.edu](mailto:deasusita26@upi.edu)

### ABSTRACT

Nowadays, the use of digital-based office automation platforms and applications is considered to save time on work, which has an impact on improving work performance more effectively and efficiently. These benefits underlie many organizations starting to adapt the use of technology in their operational activities, including government agencies. In implementing the system to be used, of course, a government agency must be based on applicable regulations. There is a regulation in Permendagri Number 70 of 2019 concerning Regional Government Information Systems which requires local governments to use an integrated web-based application that has been developed by the Ministry of Home Affairs and named the Regional Government Information System (SIPD). This study aims to analyze the effectiveness of using SIPD in local government agencies. The method used in this research is a literature study with non-print literature sources. The results found that the use of SIPD at the local government level is still not effective. SIPD still has several shortcomings that hinder the effectiveness of local government performance, especially in the development planning process. Beyond the shortcomings of SIPD, the knowledge and skills of human resources in charge of operating the system in local governments also need to be improved through technical guidance activities on the use and operation of the system. The development of this integrated system certainly aims to support bureaucratic reform in government agencies both at the central and local levels. This research contributes to the academic literature and has implications for evaluating the use of SIPD in local governments.

© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

### ARTICLE INFO

#### Article History:

*Submitted/Received Jan - Feb 2023*

*First Revised 12 Mar 2023*

*Accepted 20 May 2023*

*First Available online 20 May 2023*

*Publication Date 01 Jun 2023*

#### Keyword:

*Effectiveness*

*Office automation*

*Local government information*

*system*

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan otomatisasi kantor yang terjadi membuat setiap instansi yang awalnya hanya melakukan aktivitas kantornya secara konvensional, beralih menggunakan bantuan sistem aplikasi yang dinilai dapat memudahkan dan mempercepat suatu pekerjaan (Hendriyani, 2020). Dari sekian banyak instansi pemerintahan dengan masing-masing bidangnya, salah satu diantaranya yaitu bidang yang berfokus pada perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yaitu Bappelitbangda. Badan ini bertugas untuk menghimpun aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan. Untuk memudahkan aktivitas kantornya, Bappelitbangda menggunakan sistem aplikasi otomatisasi perkantoran dalam kegiatan operasional pekerjaannya.

Tahap awal yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan suatu daerah ialah mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebelum memanfaatkan sistem otomatisasi kantor, terlebih dahulu Bappelitbangda melakukan musrenbang dengan cara mengadakan forum di suatu tempat, yang mana di dalam forum tersebut, setiap perangkat daerah akan diberikan kertas formulir yang nantinya akan diisi dengan usulan-usulan perencanaan yang mereka perlukan. Hal ini membuat Bappelitbangda kerap kali mengalami kendala dan kesulitan karena kertas formulir tersebut akhirnya menumpuk dan terkadang terdapat formulir yang hilang. Maka dari itu dengan perkembangan otomatisasi yang terjadi, kini Bappelitbangda menggunakan sebuah sistem berbasis digital dalam pelaksanaan aktivitas kerjanya dalam upaya mempermudah kegiatan kantor yang dilaksanakan.

Penggunaan sistem dalam sebuah instansi tentu tidak bisa dilakukan secara cuma-cuma, melainkan harus berdasarkan pertimbangan dari beberapa hal, diantaranya mengenai keefektifan dari penggunaan sistem itu sendiri. Maka dalam pengimplementasian sistem yang digunakan oleh instansi pemerintahan, harus memiliki landasan hukum yang berlaku (Khobiburrohma, Margareta, & Hasbullah, 2020).

Adapun regulasi yang mengatur penggunaan sistem di instansi pemerintahan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391 (Yustisia, 2015). Pada awal kemunculan Undang-Undang ini, pemerintah pusat mengharuskan setiap pemerintah daerah menggunakan sistem, sehingga setiap pemerintah daerah berlomba untuk membuat suatu sistem yang akan digunakan sebagai penunjang pekerjaannya. Karena sistem ini dibuat oleh masing-masing pemerintahan daerah, sehingga setiap daerah memiliki sistem yang beragam dan tidak terintegrasi ke sistem pemerintah pusat. Hal tersebut membuat pemerintah pusat kesulitan dalam memantau dan menghimpun data dari setiap daerah.

Maka dari itu, aturan mengenai penggunaan aplikasi berbasis web SIPD ini dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam upaya membangun dan mengembangkan suatu informasi sehingga menghasilkan layanan berupa data informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan bantuan elektronik (bpk.go.id, 2019). Aplikasi SIPD dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Setiap

Pemerintahan daerah wajib menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, mengharuskan setiap pemerintah daerah menggunakan SIPD. Dampak penggunaan SIPD di instansi pemerintahan khususnya pemerintah daerah ini menjadi topik kajian yang perlu diperdalam. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan efektivitas penggunaan aplikasi berbasis web SIPD untuk menunjang kinerja instansi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Efektivitas Kerja**

Saat ini, efektivitas kerja dalam suatu instansi merupakan suatu keharusan yang didorong dengan tuntutan untuk menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun layanan yang berkualitas. Menurut Murti dkk (2013), efektivitas merupakan kemampuan organisasi dalam melakukan tugas pokoknya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Setiap kegiatan diarahkan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sumber daya organisasi dengan sebaik-baiknya. Efektivitas juga berarti suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas yang telah dilakukan pada suatu organisasi mampu memberikan gambaran terkait dengan tingkat keberhasilan organisasi tersebut dalam mencapai target dan tujuan yang telah dirumuskan (Anggraeni & Yuniarsih, 2017).

Menurut Misnawati (dalam Wihartanti, 2017), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja dalam organisasi, diantaranya waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan, lingkungan kerja, perlengkapan dan fasilitas.

### **2.2. Otomatisasi Kantor**

Menurut O'Brien (dalam Rachman, 2022), otomatisasi kantor adalah suatu sistem yang disertai dengan teknologi informasi berbasis telekomunikasi yang di dalamnya terdapat beberapa aktivitas seperti penghimpunan, memproses, melakukan penyimpanan dan mendistribusikan pesan, dokumen serta komunikasi elektronik lainnya dengan melibatkan individu, kelompok kerja, dan organisasi.

Sedangkan, The Liang Gie (dalam Yusuf, 2020) mendefinisikan bahwa otomatisasi merupakan perluasan dan mekanisasi dimana penggunaan mesin yang dijalankan memiliki pengaturan tanpa melibatkan banyak tenaga manusia kecuali hanya untuk pengoperasian tombol-tombol penggerakannya saja.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa otomatisasi kantor ialah suatu usaha penyempurnaan pekerjaan kantor dari yang awalnya secara konvensional beralih menjadi menggunakan bantuan mesin atau sistem yang dilengkapi dengan teknologi.

Penggunaan otomatisasi kantor tentu saja memiliki tujuan bagi perusahaan atau instansi itu sendiri. Otomatisasi kantor diklasifikasikan menjadi beberapa model, diantaranya adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat gabungan. (Yusuf, 2020).

### **2.3. Sistem Otomatisasi Kantor**

Secara lebih spesifik, sistem otomatisasi kantor dapat dikatakan sebagai aplikasi teknologi informasi berupa sebuah sistem yang diperuntukan bagi pembuatan, penyimpanan, pengambilan, perubahan maupun pengkomunikasian atas suatu informasi yang ada di kantor atau perusahaan guna menumbuhkan secara maksimal produktivitas kerja dari para karyawan. Sistem Otomatisasi perkantoran memiliki lima poin yang terlibat di dalamnya, yaitu *hardware, software, brainware, database, dan procedure*.

### **2.3. Sistem Informasi**

Sistem informasi merupakan gabungan dari bagian yang saling berhubungan antara satu sama lain dalam sebuah organisasi dengan upaya untuk mempertemukan antara kebutuhan yang berkaitan dengan urusan transaksi harian dengan fungsi strategi dari suatu organisasi atau kantor serta aktivitas operasional organisasi yang bersifat manajerial agar mampu menyajikan berita yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan yang membutuhkan

Sedangkan menurut Jogiyanto (dalam Ikhsan, 2020), sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkesinambungan yang berhubungan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Haryadi (dalam Syahyuni, 2012) mendefinisikan sistem informasi sebagai pendukung penggunaan data yang hanya berupa analisis informasi berbentuk transformasi bahan berita yang diubah sebelum dilakukan pendistribusian secara menyeluruh. Inti dari sistem informasi dalam sebuah organisasi adalah ketika terdapat suatu data yang telah diolah kemudian berubah menjadi bentuk data yang memiliki nilai sehingga dapat digunakan oleh penerimanya untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan di masa sekarang maupun di masa mendatang.

Sistem informasi bermanfaat bagi sebuah organisasi dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Hal ini akan bermanfaat bagi kualitas sumber daya manusia, sistem informasi juga dapat memaksimalkan efisiensi dari sumber daya yang dimiliki organisasi, dapat mengendalikan pengeluaran dan pemasukan dana dalam organisasi, mengefisienkan pekerjaan kantor dan sebagai salah satu upaya bagi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah dibuat. Sistem informasi yang baik memiliki ciri fleksibel, adaptif, sistematis, sederhana, fungsional, dan optimal dalam memanfaatkan sumber dayanya.

Dalam penerapan sistem informasi dalam kantor, perlu memperhatikan prinsip-prinsip dimana sistem informasi perkantoran harus dirancang sesederhana mungkin supaya mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Selain itu, sistem informasi kantor juga harus memanfaatkan penggunaan mesin kantor secara optimal.

### **2.4. Aplikasi Berbasis Web SIPD**

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan landasan yang digunakan dalam implementasi pelaksanaan keselarasan perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya regulasi tersebut, terbitlah sebuah aplikasi berbasis web yang bernama SIPD. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan atas regulasi yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391 (Yustisia, 2015). Dimana setelah diterbitkannya Peraturan menteri dalam negeri ini, seluruh instansi pemerintahan daerah di Indonesia harus menggunakan aplikasi SIPD untuk penerapan sistem perencanaan dan pengolahan anggaran berbasis teknologi.

SIPD berisi sebuah sistem pengelola informasi perencanaan pembangunan daerah, dana daerah, sistem pembinaan serta pengawasan instansi di daerah dan informasi yang diperlukan dalam pemerintahan daerah lain yang saling terhubung untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah (Ekaputra, 2021).

Aplikasi berbasis web ini dapat digunakan untuk menunjang kegiatan dokumentasi, administrasi, dan pengolahan data pembangunan daerah yang berkualitas dan inovatif sehingga menghasilkan output berupa informasi yang nantinya akan diperlihatkan pada masyarakat hingga kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja ASN di dalam instansi pemerintahan daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam ini yaitu studi literatur. Dimana penulis melakukan rangkaian aktivitas penghimpunan bahan referensi dengan cara mencari data, membaca, menganalisis dan mencatat, serta mengolah data sehingga tersusun menjadi bentuk laporan artikel. Sumber pustaka berasal dari media bacaan non-cetak berupa e-jurnal nasional yang memiliki hubungan dan berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelusuran referensi bacaan dimulai dengan melakukan pencarian pada aplikasi Publish or Perish yang terhubung dengan Google Scholar (1 Desember 2022).

Pencarian data dilakukan dengan menggunakan kata kunci “otomatisasi kantor” dan “sistem informasi pemerintahan daerah”. Selanjutnya diperoleh sejumlah 106 artikel pada google scholar yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017 sampai dengan 2022). Berikutnya, dipilih beberapa artikel yang paling sesuai dengan topik yang dibahas. Sumber dari buku elektronik nasional maupun internasional yang didapatkan dengan cara melakukan pencarian dalam Google Books dengan kata kunci “otomatisasi kantor” dan “sistem pembangunan daerah” juga ditambahkan untuk memperkaya pustaka dalam penelitian ini. Seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penggunaan aplikasi berbasis web SIPD terhadap efektivitas proses pembangunan daerah belum sesuai dengan tujuan sasaran yang diharapkan. Aplikasi SIPD ini memang dinilai bisa mempermudah pekerjaan harian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintahan. Namun, pemangku kepentingan yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengisi data dalam aplikasi ini belum memahami secara menyeluruh terkait dengan pengisian data yang benar.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori para pakar yang ada, sistem informasi dalam sebuah kantor memiliki banyak kelebihan, diantaranya dapat dinilai dapat memudahkan dan mempercepat suatu pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah membuat sebuah aplikasi berbasis web yang bernama SIPD guna mengintegrasikan perencanaan pembangunan yang ingin diajukan oleh setiap daerah serta bermaksud untuk mengefisienkan pekerjaan setiap pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Namun berdasarkan hasil analisa yang terjadi di lapangan berdasarkan literatur yang dirujuk dalam penelitian ini (Deseverians & Wulandari, 2020; Ekaputra, 2021; & Ikhsan, 2020), ditemukan bahwa penerapan SIPD ini belum berjalan efektif secara menyeluruh pada setiap daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari para pemangku kepentingan yang bertugas untuk mengisi data perencanaan daerahnya belum melakukan tugasnya secara tepat.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Deseverians & Wulandari, 2020), disebutkan bahwa suatu sistem harus disertai dengan sosialisasi berupa seminar, bimbingan teknis, dan sosialisasi lainnya yang dapat meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan dalam perolehan data yang diperlukan supaya penggunaan SIPD ini dapat berjalan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang direncanakan di awal.

Dalam pengimplementasiannya, data yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan ternyata belum menyediakan ketersediaan data sesuai dengan keadaan seluruh daerah secara menyeluruh, sehingga ditemukan banyak data yang belum terisi sebab data yang tersedia tidak relevan dengan bentuk perencanaan yang diinginkan. Pihak pemohon perencanaan kerap kali memasukan data yang tidak lengkap sehingga perencanaannya tidak dapat disetujui oleh pusat. Misalnya, ketika ingin merencanakan renovasi suatu madrasah, terkadang pihak pemohon tidak mencantumkan foto madrasahya.

SIPD ini diluncurkan untuk mengalihkan media formulir perencanaan pembangunan menjadi bentuk papperless supaya tidak terjadi penumpukan dan kehilangan formulir. Namun ternyata SIPD ini lebih tepat dijadikan sebagai pengontrol kegiatan dan program pembangunan daerah saja dikarenakan pengetahuan pemangku kepentingan yang terbatas. Studi yang dilakukan oleh Rochman, Nurhasanah & Mambang (2022) menemukan bahwa penguasaan teknologi dan informasi dari sumber daya manusia pada lingkup kelurahan masih kurang memadai. Selain itu, pihak pemohon perencanaan pembangunan kerap kali tidak memperhatikan tenggat waktu yang telah ditentukan. Karena jika penginputan data dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan, maka perencanaan yang ingin diajukan tidak dapat diproses.

Dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, penggunaan SIPD masih rutin dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan bimbingan teknis atau training of trainer (ToT) terkait

dengan penggunaan SIPD pada masa awal kemunculannya (Andika, 2020). Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat tidak lagi memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para operator SIPD di pemerintah daerah, khususnya apabila terdapat pembaharuan fitur dari sistem tersebut.

Pada dasarnya, aplikasi SIPD ini telah terintegrasi sesuai dengan tujuan awal pembuatannya, sehingga dapat memudahkan pihak pusat dalam proses penghimpunan data perencanaan dan pembangunan dari setiap daerah di Indonesia. Selain itu, dengan adanya aplikasi SIPD ini membuat susunan kegiatan menjadi lebih sistematis karena dalam proses pemasukan datanya harus diinputkan mulai dari tahap perencanaan, sehingga tidak ada kegiatan yang tiba-tiba muncul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa perencanaan sebelumnya. Penggunaan SIPD dapat dilakukan secara fleksibel dimana saja selama perangkat yang memadai untuk digunakan terhubung dengan jaringan internet.

Diantara kelebihan-kelebihan yang terdapat pada aplikasi SIPD tersebut, ternyata aplikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, khususnya dalam pengoperasiannya. Karena SIPD ini termasuk dalam kategori aplikasi yang baru, maka aplikasi tersebut masih memerlukan tahap penyesuaian. Ketika masa peralihan dari paperbased menuju paperless menggunakan sistem ini, pada dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) terdapat auto kegiatan atau hasil kegiatan. Dalam bagian tersebut, terkadang hasil yang muncul pada sistem tidak persis sama dengan dokumen manual kegiatan yang telah dilakukan. Penginput atau operator data juga harus membuat rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara manual terlebih dahulu sebagai catatan agar memudahkan proses pemasukan data dalam aplikasi.

Beberapa kekurangan aplikasi ini berkaitan dengan fitur yang tersedia di dalamnya, seperti pada fitur standar harga. Ketika operator ingin memasukan data pembelian perencanaan, terkadang nominal standar harganya belum tersedia. Hal ini akan berpengaruh terhadap nominal pada jumlah akhir rencana pembelian yang diinginkan. Selain itu, ketika operator telah selesai memasukan satu item data, saat diklik pilihan simpan, maka tampilannya akan kembali ke menu awal (tidak langsung menuju ke kolom item berikutnya).

SIPD ini juga sering mengalami server error yang disebabkan oleh terlalu banyaknya pihak yang mengakses aplikasi ini secara bersamaan karena sistem ini diperuntukan bagi seluruh pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut membuat jam kerja ASN yang bertugas untuk memasukan data dalam aplikasi ini menjadi bertambah karena biasanya penggunaan sistem aplikasi ini akan berjalan lancar apabila digunakan ketika malam hari (di luar jam kerja).

Kekurangan selanjutnya yaitu akun atau id yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi berbasis web ini bersifat single account sehingga ketika dihadapkan pada pekerjaan yang menumpuk tidak dapat dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Karena aplikasi ini terintegrasi langsung ke database pusat, sehingga proses birokrasinya menjadi lebih panjang dan lama. Misalkan, pada bagian keuangan kerap kali ditemukan kendala apabila nominal yang dimasukan salah atau terdapat kekurangan harga, maka tidak bisa diperbaiki oleh operator SIPD pemerintah daerah, melainkan harus melakukan konfirmasi dan menunggu terlebih dahulu perubahan dari pihak pusat. Hal lainnya yang menghambat penggunaan

aplikasi ini adalah ketika pengguna meninggalkan laman website tersebut, sekalipun dengan waktu yang sebentar, maka pengguna akan dibawa kembali ke halaman awal, sehingga pengguna harus login kembali dengan cara memuat ulang website-nya dari awal.

Beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SIPD yang telah dijabarkan sebelumnya diperoleh dari studi literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan penggunaan SIPD pada tingkat pemerintah daerah. Dari proses analisis, diperoleh hasil bahwa aplikasi SIPD yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan oleh pemerintah daerah masih belum efektif secara penggunaannya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian oleh Deseverians & Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi SIPD dalam perancangan pembangunan tahunan daerah belum bisa berjalan secara efektif. Hal tersebut dinilai berdasarkan analisis pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Studi lain dari Ekaputra (2021) juga menyatakan bahwa penggunaan aplikasi SIPD pada pemerintah daerah belum efektif dikarenakan masih kurangnya pemahaman pengguna atau operator terhadap aplikasi serta dengan adanya perubahan nomenklatur program kegiatan membuat bingung pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja. Berbagai penyesuaian dan perbaikan perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sistem ini. Pengembangan sistem terintegrasi seperti SIPD ini tentunya merupakan upaya yang digaungkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Instansi pemerintahan, dalam menerapkan sistem yang hendak digunakan tentunya harus berlandaskan aturan yang berlaku. Regulasi yang digunakan adalah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Peraturan ini mengharuskan pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yang telah dikembangkan oleh Kemendagri dan dinamakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam penggunaannya, aplikasi SIPD masih memiliki beberapa kekurangan yang menjadi penghambat dalam efektivitas kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan. Di luar kekurangan SIPD tersebut, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada di pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan melalui kegiatan bimbingan teknis penggunaan dan pengoperasian sistem. Pengembangan sistem terintegrasi ini tentunya bertujuan untuk mendukung reformasi birokrasi pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Penelitian tentang efektivitas penggunaan aplikasi SIPD ini berkontribusi untuk memperkaya literatur akademik tentang teknologi digital perkantoran serta berimplikasi sebagai evaluasi dari penggunaan aplikasi SIPD. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menguji pengaruh kualitas SDM pada pemerintah daerah yang dinilai berdasarkan pengetahuan dan keterampilan digital terhadap efektivitas penggunaan aplikasi SIPD.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**



- Andika, T. H., Setiawan, A. E., Feriyanto, D., Ardhy, F., & Afdhalluddin, A. (2020). Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pada Bappeda Kabupaten Pringsewu). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu (ABDI KE UNGU)*, 2(3), 144-147.
- Anggraeni, W., & Yuniarsih, T. (2017). Dampak tata ruang kantor terhadap efektivitas kerja pegawai dinas pendidikan kota Bandung. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 2(2), 105-112.
- Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 13-30.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62-79.
- Erawati, I., Darwis, M., Nasrullah, M., & Makassar, U. N. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*, 3(1), 13-18.
- Hendriyani, M. (2020). Pengendalian Surat Masuk Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di Subbagian Persuratan dan Arsip Aktif Pada Arsip Nasional Republik Indonesia. *KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, ORGANISASI DAN BISNIS*, 9(02), 37-46.
- Ikhsan, N., & Ramadhani, S. (2020). Sistem informasi administrasi surat menyurat kantor wilayah kementerian agama Provinsi Riau. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 2(2), 141-151.
- Khobiburrohma, E. N., Margareta, P. S., & Hasbullah, M. H. (2020). Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance. *Journal: Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 139-148.
- Murti, N. L. B. M., Rahardjo, K., & Riza, M. F. (2013). Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Efektivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 6(2).
- Primawanti, E. P., & Ali, H. (2022). Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Informasi Berbasis Web Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Executive Support Sistem (Ess) for Business). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 267-285.
- Rachman, R. M. (2022). Penggunaan Aplikasi Pendeteksi Plagiarisme Image Sebagai Fasilitas Pendukung Otomatisasi Perkantoran. *Manajerial*, 21(1), 36-40.
- Rochman, W. N., Nurhasanah, N., & Mambang, M. (2022). Analisis Kualitas Sumber Daya Aparatur Pada Kantor Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau: Analysis Of The Quality Of Apparatus Resources At The Office of Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. *Pencerah Publik*, 9(2), 27-39.
- Syahyuni, D. (2012). Otomatisasi Kantor dalam Menangani Surat Masuk dan Keluar dalam Sebuah Organisasi Modern. *Widya Cipta*, 3(2), 138-143.
- Wihartanti, L. V. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen). *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 5(2), 147-160.

Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. VisiMedia.

Yusuf, R., Hendrayati, H., Wibowo, L. A., & Hadiaty, F. (2020). Sistem Otomatisasi Kantor di Perusahaan Y Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal E-Bis*, 4(1), 1-11.